KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Proyek Alun-alun Parlemen Senilai Rp 281 Miliar Dikritik
Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 9

Proyek Alun-alun Parlemen Senilai Rp 281 Miliar Dikritik

Anggaran itu bisa untuk membangun 1.000 unit rumah susun sederhana.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengkritik rencana pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan alun-alun demokrasi di Komplek Parlemen Senayan tahun depan. Proyek senilai Rp 281 miliar yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dinilai tak masuk di akal dan boros.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan rencana pembangunan alun-alun di Senayan itu menunjukkan ketidakpekaan Dewan terhadap keadaan sosial-ekonomi saat ini. "Rakyat lebih membutuhkan ketersediaan fasilitas pendidikan, rumah tinggal, dan kesehatan," kata dia, kemarin.

Menurut Yenny, dana ratusan miliar rupiah juga tak ekonomis jika hanya untuk membangun alun-alun yang akan dijadikan arena demonstrasi di dalam Kompleks Parlemen. Yenny berharap pemerintah membatalkan proyek yang menurut dia berpotensi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut mengamanatkan pengelolaan keuangan negara secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.

Dia menilai usul pembangunan alun-alun ini mengada-ada lantaran DPR tetap dapat menyerap aspirasi rakyat lewat rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan reses. "Saya khawatir dananya justru akan jadi bancakan untuk Pemilu 2019," kata Yenny.

Pembangunan alun-alun demokrasi masuk tujuh megaproyek DPR yang dicanangkan pada 2015. Selain alun-alun, direncanakan pembuatan museum dan perpustakaan, jalan akses tamu ke gedung DPR, ruang pusat kajian legislasi, gedung baru untuk anggota DPR, integrasi kawasan tempat tinggal anggota Dewan berupa apartemen, dan *visitor center*.

Sempat mencoretnya pada Mei lalu, pemerintah kini kembali mengalokasikan anggaran untuk proyek alun-alun DPR. Selain alun-alun, pagu anggaran senilai Rp 5,72 triliun buat Dewan tahun depan akan dipakai untuk membangun gedung baru parlemen senilai Rp 320 miliar.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghada, juga heran atas biaya pembangunan alun-alun yang fantastis. Menurut dia, dana membangun fasilitas terbuka untuk demonstrasi seharusnya hanya Rp 3 juta per meter persegi. Angka itu merujuk pada biaya yang biasa dipakai pengembang untuk pembangunan jalan aspal.

Itu sebabnya, Ali tak bisa membayangkan seberapa luas alun-alun yang akan dibangun DPR dengan usul dana Rp 280 miliar. Begitu juga bahan bangunan yang akan dipakai. "Mereka ingin tanam emas atau apa?" ujarnya.

Selain itu, Ali menghitung bujet ratusan miliar rupiah tersebut setara dengan kebutuhan membangun 1.000 unit rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Dana itu bisa digunakan untuk bikin dua *tower* rusunami."

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Anton Sihombing, mengatakan Dewan masih menunggu surat dari pemerintah untuk membahas seluruh anggaran buat DPR, termasuk pembangunan alun-alun dan gedung baru. "Setelah itu, baru dibahas di Badan Anggaran," ujarnya. Namun politikus Golkar ini tak dapat memaparkan detail rencana alun-alun yang akan dibangun.

Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned mengatakan pembangunan alun-alun akan dimulai pada akhir 2018. "Nanti akan disusun manajemen konsultan terlebih dahulu," ujarnya. ● HUSSEIN ABRI | AGOENG